**BAB I**

**Pendahuluan**

* 1. **Latar Belakang**

Kemakmuran sebuah negara dapat diukur dari berbagai sudut pandang yang berbeda, salah satunya dapat diukur dari sudut pandang kondisi perekonomian dari suatu negara tersebut. Negara Indonesia masih masuk dalam kategori negara berkembang, negara Indonesia masih perlu diadakan pembenahan dan perbaikan sistem perekonomian supaya dapat mencapai taraf perekonomian yang lebih maju dalam rangka mencapai suatu tujuan yang dalam hal ini adalah kemakmuran suatu negara. Salah satu upaya untuk meningkatkan taraf perekonomian negara Indonesia adalah memberdayakan masyarakat Indonesia.

Pemberdayaan adalah istilah yang sangat populer dalam hal pembangunan dan mengatasi masalah perekonomian. Pemberdayaan masyaarakat adalah suatu proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat dalam bentuk penggalian kemampuan yang terdapat pada diri pribadi masyarakat, kreatifitas, kompetensi dan daya fikir serta tindakan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat juga sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat perkembangan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut Payne dan Sharddlow dalam Rukminto Adi (2002 : 162-163) dalam Chabib Soleh (2014:27) :

“Tujuan utama pemberdayaan adalah membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan, yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Pemberdayaan menyangkut tentang permasalahan bagaimana individu, kelompok maupun masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka”.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja masyarakat dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas para pemerintah kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun UMKM masih saja menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik hambatan yang bersifat internal maupun hambaan yang bersifat eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran hasil produksi, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Bagi pelaku UMKM, modal merupakan hal yang paling mendorong dalam kegiatan suatu usaha yang dijalani dan untuk kegiatan operasional suatu usaha serta pembelian persediaan yang dibutuhkan dari sebuah usaha yang berupa bahan baku atau barang yang akan dikelola dari usaha yang dijalani. Untuk menunjang kelangsungan usaha yang dijalani dan menjembatani hubungan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan perbankan dalam rangka mendukung fungsi perbankan dan pemberian modal pinjaman serta pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dijelaskan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dimana tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan;
2. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
3. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Kabupaten pringsewu adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki potensi daerah yang cukup beragam, kabupaten Pringsewu selalu berusaha untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki di wilayahnya. Dari beberapa potensi yang ada di pringsewu ini, ada beberapa masyarakat yang mempunyai kreativitas untuk mengembangkan potensi tersebut, salah satunya melakukan usaha mikro yang mengelola potensi alam menjadi produk yang mempunyai nilai jual yang diharapkan dapat bersaing baik di pasar lokal, pasar nasional maupun pasar internasional. Di Kabupaten Pringsewu, industri kecil dengan kriteria usaha mikro yang dalam hal ini dikelola oleh masyarakat ini haruslah dikembangkan mengingat Kabupaten Pringsewu adalah sebuah Kabupaten yang bisa dikatakan sebagai kabupaen baru yang saat ini perkembangannya sangat pesat namun para pengrajin ini pola pemikirannya bisa dikatakan masih rendah, demikian juga tenaga terampil yang tersedia masih terbatas, permodalan dan manajemen yang juga masih sangat terbatas sehingga belum mampu memenuhi permintaan konsumen atas produk-produk yang dihasilkan dari usaha mikro tersebut.

Keberadaan industri dengan kriteria usaha mikro ini sangatlah bermanfaat dan berperan dalam sendi kehidupan ekonomi di masyarakat karena industri dengan kriteria usaha mikro ini tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat saja, tetapi juga dapat menyerap tenaga kerja, memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia di daerah tersebut, serta memperkuat ekonomi lokal sehingga pendapatan daerah Kabupaten Pringsewu melalui pajak dapat meningkat dan turut menggunakan produk-produk hasil dari usaha mikro yang ada di kabupaten Pringsewu ini.

Pengembangan usaha mikro di kabupaten Pringsewu pada saat ini masih dianggap kurang produktif dalam mengatasi permintaan para konsumen atas produk-produk yang dihasilkan dari usaha mikro tersebutyang semakin hari semakin bertambah, antara lain karena kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia yang masih minim dalam mencari inovasi-inovasi baru yang dapat menambah variasi dari produk yang dihasilkan oleh usaha mikro di kabupaten pringsewu.

Minimnya kemampuan sumber daya manusia ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dari para pelaku usaha mikro di kabupaten Pringsewu serta rendahnya teknologi yang mempengaruhi tingkat kualitas suatu produksi industri yang berskala mikro tersebut. Dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat membantu para pelaku usaha mikro tersebut guna menunjang produksi dari usaha mikro ini dengan cara memberikan pengetahuan tentang cara atau teknik manajemen yang belum dipahami oleh parapelaku usaha mikro di Kabupaten Pringsewu. Masalah lainnya adalah modal para pelaku usaha mikro yang terbatas dalam rangka peningkatan usaha yang sedang dilakukan yang dalam hal ini adalah usaha-usaha yang berskala mikro.

Aspek pemasaran bisa dikatakan sebagai salah satu aspek yang penting dalam pengembangan usaha mikro di kabupaten Pringsewu ini. Aspek pemasaran ini juga patut menjadi sebuah perhatian pemerintah setempat dalam membantu para pelaku usaha mikro dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan dari usaha mikro yang ada di kabupaten Pringsewu tersebut, hal ini dikarenakan pemasaran memegang peranan yang cukup penting dalam pengembangan usaha mikro tersebut guna menambah pendapatan para pelaku usaha mikro yang ada di kabupaten Pringsewu. Dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu dapat dikatakan masih kurang dalam memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para pelaku usaha mikro yang ada di kabupaten Pringsewu sehingga potensi dan pengetahuan para pelaku usaha mikro masih belum maksimal serta produk yang dihasilkan dari usaha mikro tersebut kurang memuaskan.

* 1. **Ruang Lingkup, Fokus dan Lokasi**
     1. **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup magang merupakan suatu bentuk batasan bidang bagi penulis dalam melakukan kegiatan penulisan laporan magang, agar penulis dapat memusatkan fikiran serta dapat menjelaskan bagian–bagian kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan magang itu sendiri. Ruang lingkup juga merupakan sebuah batasan lingkup magang yang akan dilaksanakan oleh penulis sesuai dengan bidang studi keilmuan yang sedang di jalani. Dalam hal ini penulis sedang menjalani pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, fakultas Politik Pemerintahan dengan Program Studi Pembangunan dan Pemberdayaan. Dengan demikian penulis melakukan penelitian sesuai dengan program studi tersebut dengan ruang lingkup pemberdayaan pelaku usaha mikro di kabupaten Pringsewu..

* + 1. **Fokus**

Dalam hal ini penulis melakukan magang yang dimaksudkan supaya mengetahui bagaimana kondisi pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu. Makadari itu penulis menentukan fokus dari magang yang dilakukan yaitu pemberdayaan pelaku usaha mikro di abupaten Pringsewu.

* + 1. **Lokasi**

Dalam penelitian ini penulis juga menentukan lokasi magang riset terapan pemerintahan di Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan kabupateng Pringsewu.

* 1. **Maksud dan Tujuan**
     1. **Maksud**

Maksud dari pelaksanaan kegiatan Magang Riset Terapan Pemerintahan yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengumpulkan data yang relevan dan sesuai dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pelaku usaha mikro di kabupaten Pringsewu.

* + 1. **Tujuan**

Dalam pelaksanaan Magang Riset Terapan Pemerintahan penulis mampunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan Magang Riset Terapan Pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaan yang dilaksanakan kepada para pelaku usaha mikro di kabupaten pringsewu.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara yang ditempuh oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan dalam memberdayakan para pelaku usaha mikro di kabupaten Pringsewu.
   1. **Kegunaan**

Kegunaan dari magang riset terapan pemerintahan yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara apa saja yang ditempuh dalam pemberdayaan masyarakat pelaku usaha mikro dalam meningkatkan kesejahteraan para pengrajin rotan tersebut.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi lembaga IPDN dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan, khususnya di bidang politik pemerintahan dan lebih spesifiknya lagi di bidang pembangunan dan peberdayaan.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan informasi serta evaluasi bagi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu terutama dalam memberdayakan para pelaku usaha mikro dalam meningkatkan pendapatannya.

**BAB II   
TINJAUAN TEORETIS DAN LEGALISTIK**

1. **Tinjauan Teoretis**
2. **Pemberdayaan**

Totok dan Poerwoko (2013:14) memberikan defenisi pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan ( kemampuan

dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan guna memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok dan masyarakat dalam arti luas).

Sumodiningrat (2001), menyatakan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki untuk menentukan pilihan kegiatan yang paling seusai bagi kemajuan diri mereka masing-masing. Lebih lanjut Kartasasmita (1996), menyatakan bahwa memberdayakan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau dengan kata lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Partisipasi dari masyarakat juga sangat diperlukan dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan karena partisipasi atau peranserta pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam menunjang pelaksanaan suatu program pembangunan dan pemberdayaan di suatu daerah.

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya, setiap program pembangunan dan pemberdayaan yang dibuat oleh pemerintah termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi dana selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat yang lebih mencerminkan sifat kebutuhhan kelompok-kelompok yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat banyak. Maka dari itu partisipasi dari masyarakat perlu diperhatikan melalui diadakannya forum yang memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan dan pemberdayaan di wilayahnya atau di tingkat lokal.

1. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai, dan atau beragambentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat. Di samping itu, yang sering dilupakan dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan adalah partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan proyek-proyek pembangunan kemasyarakatan yang telah berhasil diselesaikan. Makadariitu perlu adanya kegiatan khusus untuk mengorganisir warga masyarakat guna memelihara hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat terus dinikmati dalam jangka panjang tanpa terjadinya penurunan kualitasnya.

1. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi

Partisipasi dalam pemantuan dan evaluasi ini sangatlah diperlukan supaya tujuan yang dicapai dapat sesuai dengan apa yang diharapkan serta mengetahui tentang masala-masalah atau kendala-kendala yang muncul selama pelaksanaan program yang bersangkutan itu berjalan. Dalam hal ini sangatlah diperlukan partisipasi dari masyarakat dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan program yang sedang berjalan seerta perilaku aparat yang ikut andil dalam pelaksanaan program tersebut.

1. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab, tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program yang akan datang.

Dusseldorp (1981) dalam Mardikanto dan Soebiato (2012:84) mengidentifikasikan beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa :

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
4. Menggerakkan sumber daya masyarakat;
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan;
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat.

Secara teoritis, menurut Sumardjo (1999) ciri-ciri masyarakat berdaya adalah sebagai berikut :

1. Mampu memahami potensi yang ada pada dirinya
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuatan untuk berunding
4. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan, dan
5. Bertanggungjawab atas tindakannya.
6. Mampu memahami potensi yang ada pada dirinya

Dimana dalam hidupnya setiap manusia harus mengetahui apa potensi yang terdapat pada dirinya supaya dapat menjalani hidup sesuai dengan kemampuannya. Menurut Habsari (2005) Potensi adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan jika dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik. Dalam hal ini potensi adalah kemampuan yang dimiliki para pelaku usaha mikro dalam mengelola usahanya sehingga hasil produksi dari usahanya dapat bersaing di pasar lokal, nasional maupun internasional.

Menurut Zamroni (2017) manusia memiliki potensi yang dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu potensi fisik*,* potensi mental intelektual*,* potensi emosional*,* potensi mental spiritual*,* dan potensi daya juang.

* Potensi fisik.

Potensi fisik merupakan potensi yang terdapat pada pancaindra dan organ-organ tubuh yang biasa digunakan untuk melakukan kegiatan rutin sehari-hari dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup. Dalam hal ini para para pelaku usaha mikro mempunyai panca indra yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan yang menunjang dalam proses pembuatan kerajinan rotan yang sehari-hari dilakukannya.

* Potensi mental intelektual.

Potensi ini merupakan kecerdasan yang terdapat dalam otak manusia. Dimana para pelaku usaha mikro dapat membuat inovasi-inovasi produk baru yang dihasilkan dari usaha yang saat ini sedang mereka jalani agar mendapat variasi-variasi baru untuk dipasarkan dengan harapan dapat bersaing di pasaran.

* Potensi emosional.

Potensi ini hampir sama dengan potensi mental intelektual, hanya bedanya potensi ini terdapat dalam otak kita bagian kanan. Fungsinya dapat mengendalikan rasa marah atau sabar dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha mikro yang saat ini sedang dijalani.

* Potensi mental spiritual.

Potensi ini merupakan kecerdasan yang berasal dari dalam diri manusia yang terkait dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma dan nilai, melainkan untuk menemukan norma dan nilai.

* Potensi daya juang.

Potensi ini merupakan kemampuan manusia yang berhubungan dengan keuletan, ketangguhan, dan semangat dalam menghadapi situasi dan kondisi tertentu. Potensi ini digunakan para pelaku usaha mikro untuk menghadapi berbagai kesulitan dalam usahanya. Melalui potensi ini diharapkan para pelaku usaha mikro mampu membalikkan rintangan atau penghalang menjadi peluang.

1. Mampu Mengarahkan Dirinya Sendiri

Setelah mengetahui potensi yang ada pada dirinya, para pelaku usaha mikro dapat mengarahkan dirinya sendiri dan dapat merencanakan bisnis untuk kedepannya, mengetahui apa yang harus dilakukan untuk kedepannya, mampu dalam menentukan dan mencari modal untuk menunjang usahanya yang dimana modal adalah suatu yang dibutuhkan di awal dalam suatu usaha karena tanpa modal kita tidak akan bisa melakukan suatu usaha, mampu mengatasi masalah bahan baku yang sulit didapat karena semakin bertambahnya hari ketersediaan bahan baku produksi di alam akan semakin berkurang akibat dari pengambilan bahan baku tersebut secara terus menerus, mampu berinovasi dengan menemukan desain-desain baru produk yang dibuat dengan tetap memperhatikan kualitas produk. Semua harus dikuasai dalam menjalani usaha yang sedang ditekuni yaitu sebagai pelaku usaha mikro sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh para pelaku usaha mikro tersebut.

1. Memiliki Kekuatan untuk Berunding

Para pelaku usaha mikro mampu merundingkan tentang masala-masalah atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi usahanya baik dengan sesama pelaku usaha mikro maupun dengan pihak lain yang berkaitan dengan pemasaran produk-produk yang dihasilkan. *Berunding*  berasal dari kata *runding* yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah “bercakap-cakap”. Berunding dalam hal ini berarti suatu kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling mercakap-cakap membicarakan suatu hal guna menyamakan piikiran dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Seperti halnya yang dilakukan oleh para pelaku usaha mikro dengan rekan kerjanya atau pelaku usaha mikro lainnya dengan tujuan agar dapat menemukan kesepakatan dan solusi dari masalah-masalah yang kerap dihadapi oleh para pelaku usaha mikro.

1. Memiliki *Bargaining Power*

*Bargaining* adalah suatu posisi tawar menawar barang dan jasa. *Bergaining power* adalah suatu kemampuan atau kekuatan para pelaku usaha mikro dalam menawarkan barang kerajinan yang diproduksi kepada para konsumen agar mendapatkan harga yang sesuai dengan nilai produk yang sihasilkan dari setiap usaha mikro tersebut. Sehingga antara modal dan keuntungan dari hasil produksi seimbang dansesuai dengan yang diharapkan para pelaku usaha mikro. Pada dasarnya tujuan utama dalam melakukan usaha adalah mencari keuntungan yang besar dengan modal yang seminim mungkin. Disinilah para pelaku usaha mikro dituntut untuk dapat melakukan tawar-menawar barang baik dengan pihak yang menyediakan modal dan bahan baku maupun dengan pihak konsumen atau pembeli hasil produksi dari masing-masing usaha mikro yang dijalani.

1. Bertanggungjawab Atas tindakannya

Pada dasarnya semua manusia hidup harus penuh dengan tanggungjawab, karena untuk mendapat kepercayaan dari orang lain kita harus bersungguh-sungguh dalam mempertanggungjawabkan dari apa yang sudah kita lakukan. Sama halnya denganpara pelaku usaha mikro, mereka dituntut untuk dapat bertanggungjawab atas produk-produk yang dibuat dan dipasarkan kepada konsumen supaya konsumen tetap percaya dan setia dalam menggunakan produk yang yang dihasilkan oleh masing-masing usaha mikro. Dengan demikian para pelaku usaha mikro harus siap menerima komplain dari para konsumen apabila terjadi masalah-masalah pada produk yang telah dipasarkan dalam arti lain tidak sesuai dengan minat konsumen.

Menurut Edi Suharto (2005:33) proses pemberdayaan dapat dicapai dengan melakukan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P yaitu:4

1. Pemukiman: Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan: Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemampuan mandiri mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas dari kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dari tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu mendorong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Atas dasar teori yang telah disampaikan diatas, dalam melakukan penelitian terhadap para pelaku usaha mikro di kabupaten pringsewu ini penulis harus dapat menentukan lingkup apa saja yang harus digunakan seperti yang telah disampaikan Chabib Soleh (2014:86-90) bahwa lingkup dari kegiatan pemberdayaan adalah Bina Manusia; Bina usaha; Bina lingkungan; dan Bina Lembaga yang dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan lingkup pemberdayaan Bina Usaha.

Menurut Chabib Soleh (2014:87) Bina Usaha merupakan upaya penting dalam setiap pemberdayaan, karena :

1. Bina manusia yang tidak memberikan keuntungan secara ekonomi tidak akan direspon secara positif oleh masyarakat miskin.
2. Pemberdayaan dalam bentuk apapun yang tida berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka tidak akan memperoleh dukungan dalam bentuk partisipasi secara efektif.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2012:225) cakupan dalam lingkup Bina Usaha yang diupayakan melalui pemberdayaan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pengetahuan teknis, utamanya untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan mutu dan nilai tambah produk;
2. Perbaikan manajemen untuk meningkatkan efisien usaha, dan pengembangan jejaring *kemitraan;*
3. Pengembangan jiwa kewirausahaan terkait dengan optimasi peluang bisnis yang berbasis dan didukung oleh keunggulan lokal;
4. Peningkatan aksesibilitas terhadap : modal, pasar, dan informasi.
5. Advokasi kebijakan yang berpihak kepada pengembangan okonomi rakyat.
6. **Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangaan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan meruakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Bersdasarkan definisi mengenai pemberdayaan serta usaha mikro dan usaha kecil diatas, Menurut penulis, industri usaha mikro di kabupaten Pringsewu perlu diberdayakan dan dikembangkan dalam artian dioptimalkan kemampuan dan daya saingnya. Pemberdayaan dan usaha mikro menunjukkan adanya pihak yang memberdayakan dan pihak yang diberdayakan.

Pemerintah dan Pemeirntah Daerah bekewajiban untuk memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam 4(empat) bidang diantaranya bidang produksi, bidang pemasaran, bidang sumber daya manusia serta bidang desain dan teknologi.

* Pengembangan dalam bidang produksi dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen usaha.
2. Memberikan kemudahan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang pengembangan usaha yang sedang dijalani, prodkusi dan pengolahan bahan baku, bahan penolong dan kemasan bagi produk-produk usaha mikro kecil, menengah dan koperasi
3. Mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi.
4. Meingkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi usaha menengah

* Pengembangan dalam bidang pemasaran dilakukan dengan cara :

1. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran dari produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Menyebarluaskan informasi pasar baik kepada produsen, konsumen atau pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pemasaran hasil produksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Meningkatkan kemampuan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam memanajemen dan teknik pemasaran.
4. Menyediakan sarana prasarana yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang dan promosi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
5. Memberikan dukungan promosi produk jaringan pemasaran dan distribusi produk.
6. Menyediakan tenaga konsultan profesioanal dalam bidang pemasaran produk.

* Pengembangan dalam bidang sumberdaya manusia dilakukan dengan cara :

1. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan.
2. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial.
3. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis serta penciptaan wirausaha baru

* Pengembagan dalam bidang desain dan teknologi dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan kemampuan para pelaku usaha mikro di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu.
2. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi.
3. Meningkatkan kemampuan UKM dalam bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru.
4. Memberikan insentif kepada UKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup.
5. Mendorong UKM untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.
6. **Tinjauan Legalistik**

Tinjauan legalistik merupakan salah satu cara yang digunakan untuk melihat gejala dan peristiwa pemberdayaan dari sudut pandang aturan-aturan formal yang mengatur tentang semua yang berkaitan dengan pemberdayaan. Secara Legalistik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan yang ditetapkan. Peraturan-peraturan tersebut dibuat supaya para pelaku usaha tertib dan tidak semena-mena dalam membuat usaha. den

1. **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Pengertian UMKM telah dijelaskan pada Udang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada BAB I, Pasal 1 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang berbunyi sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kriteria dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah telah disampaikan juga di Undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada BAB IV pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
   1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; ata
   2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
3. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
4. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
5. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
   1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
   2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Pada dasarnya manusia hidup di dunia ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai, seperti halnya para pelaku UMKM yang juga mempunyai tujuan yang ingin dicapai seperti yang dijelaskan pada BAB II bagian kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu pada pasal 5 yang berbunyi segabai berikut :

1. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
2. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
3. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Dalam memberdayakan pengrajin rotan yang berada di desa Patoman Kecamatan Pagelaran ini salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah setempat adalah mengembangkan usaha-usaha para pengrajin rotan dengan cara memfasilitasi pengembangan usaha para pengrajin rotan tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah BAB VI pasal 16 ayat (1) yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang :
2. Produksi dan pengolahan;
3. Pemasaran;
4. Sumber daya manusia;
5. Desain teknologi

Diharapkan pemerintah dapat memfasilitasi para pelaku usaha mikro guna membantu pengembangan usaha yang sedang lilaksanakan oleh para usaha mikro di kabupaten pringsewu. Terutama dalam bidang-bidang yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada BAB VI pasal 16 ayat (1) diatas. Pemerintah dapat membantu meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi para pelaku usaha mikro, memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan supaya mendapatkan hasil produk yang berkualitas yang dapat bersaing di pasar lokal, nasional maupun internasional, serta membantu memecahkan masalah yang berkaitan dengan permodalan parapelaku usaha mikro tersebut.

Dalam hal ini terdapat suatu kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Kondisi tersebut sering kita kenal dengan “iklim usaha”.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah BAB V Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa dalam menumbuhkan iklim usaha, seharusnya pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi :

1. Pendanaan;
2. Sarana dan prasarana;
3. Informasi usaha;
4. Kemitraan;
5. Perizinan usaha;
6. Kesempatan berusaha;
7. Promosi dagang; dan
8. Dukungan kelembagaan.

Dimana aspek-aspek tersebut selanjutnya dijelaskan dalam undang-undang yang sama pada pasal 8(delapan) sampai dengan pasal 15 (lima belas) yang isinya sebagai berikut :

Pasal 8

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

1. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
2. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
3. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
4. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

1. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
2. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 10

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

1. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
2. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
3. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

1. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
3. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
5. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
7. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 12

* + 1. Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam 7

ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

1. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
2. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.
   * 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

* + 1. Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:

1. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
2. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
3. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;
4. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
7. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
8. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
   * 1. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

1. Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:
2. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
3. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
4. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
5. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.
6. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian Pemerintah

dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

1. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan kewenangannya telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada BAB I Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
2. Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
3. pengembangan usaha;
4. Kemitraan;
5. perizinan; dan
6. koordinasi dan pengendalian.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur pada BAB IV Pasal 36 sampai dengan Pasal 51. Pada bab ini menegaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memiliki bukti legalitas usaha dalam melakukan usahanya tersebut. Bukti legalitas tersebut diberikan dalam bentuk surat izin usaha, tanda bukti pendaftaran atau tanda bukti pendataan. Pemberian izin usaha tersebut dilakukan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memenuhi persyaratan dan tata cara perizinan yang sesuai dengan ketentuan.

1. **Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah**

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan memiliki tugas pokok yakni melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang diangkat oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah Kabupaten dan Pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Pringsewu. Disamping itu Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan juga memiliki tugas pokok untuk memberdayakan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah yang diemban oleh kepala dinas dan di bantu oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM sesuai dengan yang dijelaskan pada Lampiran XIIII (lampiran tiga belas) Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah angka 3 (tiga) yang berbunyi sebagai berikut :

“Kepala Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Koperasi dan UKM meliputi sub Urusan Izin Usaha Simpan Pinjam, Pengawasan dan pemeriksaan, Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM), Pengembangan UMKM serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas”.

**BAB III**

**METODE MAGANG RISET TERAPAN PEMERINTAHAN**

1. **Desain**

Untuk mendapatkan hasil magang yang baik, penulis tidak saja harus mengetahui aturan permainan, tetapi juga harus mempunyai keteramilam-keterampilan dalam melaksanakan penelitian. Dalam menerapkan ketode ilmiah penulis harus mempunyai suatu desain penelitian sesuai dengan kondisi penelitian yang akan dilakukan. Desain penelitian harus sesuai dengan metode penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penalitian deskriptif kualitaif yang digunakan penulis dalam melaksanakan penitian ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73).

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Data adalah bagian yang paling penting dari suatu penelitian, karena dengan data yang diperoleh peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya. Teknik pengumpulan data yang dimaksud diatas pada penelitian lapangan dapat berupa kuesioner, obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian teknik yang akan dilakukan oleh penulis adalah teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

1. **Wawancara**

Dalam teknik ini dikenal adanya dua macam pedoman dalam melaksanakan wawancara, yakni wawancara terstruktur dan teknik wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, pewawancara sudah mempersiapkan terlebih dahulu apa saja pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh peneliti kepada narasumber secara tertulis. Pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah dipersiapkan tersebut dapat berupa pokok-pokok persoalaan saja. Sedangkan dalam wawancara tidak terstruktur, pewawancara tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu, melainkan langsung mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden dan mencatat jawabannya secara langsung pula.

Menurut Nazir (2011:193) pengertian wawancara adalah sebagai berikut :

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara yang dalam hal ini adalah peneliti dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara) antara lain :

1. Wawancara bebas

Pelaksanaan wawancara bebas ini dimana pewawancara yang dalam hal ini adalah peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis. Disini peneliti melakukan wawancara tanpa mempersiapkan terlebih dahulu apa saja pertanyaan-pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada narasumber. Sehingga semua pertanyaan yang diberikan kepada narasumber bersifat spontan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi pada saat melakukan wawancara.

1. Wawancara terpimpin

Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci yang sebelumnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu seperti yang dimaksud dalam wawancara terstruktur. Jadi sebelum melakukan wawancara kepada narasumber, peneliti harus mempersiapkan terlebihdahulu apa saja pertanyaan-pertanyaan yang akan dipertanyakan oleh peneliti kepada narasumber sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan kepada narasumber lebih tersusun secara sistematis.

1. Wawancara bebas terpimpin

Wawancara bebas terpimpin yaitu kombinasi antara kedua wawancara yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Sebelum melakukan wawancara peneliti sudah mempersiapkan atau merencanakan pertanyaan-pertanyaan secara teratur dan terstruktur untuk mengumpulkan data-data penting yang menunjang dari sebuah penelitian. Selanjutnya dengan melihat situasi dan kondisi pada saat melakukan wawancara, peneliti juga dapat mempertanyakan secara spontan hal-hal yang sekiranya dianggap perlu dipertanyakan untuk menunjang penelitian yang sedang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu.

Dalam hal ini yaitu dalam pelaksanaan Magang Riset Terapan Pemerintahan, penulis melakukan proses untuk memperoleh keterangan dengan cara wawancara bebas terpimpin yaitu dengan cara mendatangi dan melakukan komunikasi secara langsung dengan beberapa responden yang dianggap perlu untuk mendapatkan data atu informasi yang lengkap, dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah dipersiapkan secara rinci, teratur dan sistematis supaya mendapatkan data-data dan informasi yang lebih mendalam serta menanyakan apa saja yang dianggapnya perlu untuk dipertanyakan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan wawancara untuk menambah data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian tentang pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kabupaten Pringsewu.

1. **Dokumentasi**

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi dapat diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang tersimpan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kabupaten Pringsewu. Dokumen merupakan data-data yang tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi.

Kajian dokumen dilakukan dengan cara menyelidiki data yang didapat dari dokumen, catatan, *file*, dan hal-hal lain yang sudah didokumentasikan. Metode ini relatif mudah dilaksanakan, apabila ada kekeliruan mudah diganti karena sumber datanya tetap (Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, 2016 : 139). Berdasarkan hal tersebut peneliti menyelidiki data yang didapat dari dokumen mengenai pelaku usaha mikro yang terdapat di Kabupaten Pringsewu serta menyelidiki upaya apa sajakah yang dilakukan pemerintah setempat dalam memberdayakan para pelaku usaha mikro yang terdapat di Kabupaten Pringsewu tersebut.

Djam’an (2011:149) mengatakan bahwa : dokumnentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. Menurut (Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, 2016 : 139) ada beberapa jenis data yang dikumpulkan dalam melaksanakan suatu penelitian, jenis data yang dikumpulkan itu berupa dokumentasi tertulis, bahan *audiovisual* dan data *elektronis.*

1. Dokumen Tertulis

Dokumen tertulis adalah sebuah dokumen yang bentuk fisiknya adalah tertulis. Ada banyak jenis yang termasuk dokumen tertulis, beberapa diantaranya adalah yang berbentuk peraturan, data statistik, dokumen perencanaan, deskripsi kerja, laporan keuangan, catatan kinerja dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti dapat menggali informasi dan mendapatkan data-data yang dibutuhkan yag ada kaitannya dengan pemberdayaan pengrajin rotan di Desa Patoman, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu guna menunjang pembuatan laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1. *Bahan Audiovisual*

Seiring berkembangnya zaman dengan kemajuan-kamajuan teknologi yang semakin hari semakin maju, bentuk dokumenpun juga sudah berkembang sedemikian rupa. Dizaman yang serba kemajuan teknologi ini dokumen tidak hanya tersimpan dalam bentuk tulisan saja, namun dokumen saat ini dapat tersimpan dalam bentuk lain misalnya audiovisual, film, *micro chip,* dan sejenisnya. *Audio visual* terdiri atas dua kata yaitu *audio* yang artinya suara dan *visual* yang artinya gambar. Bentuk dokumen ini lebih baik daripada dokumen tertulis, karena bentuk *audio visual* ini meliputi dua bentuk yaitu gambar dan suara sehingga peneliti mendapatkan data yang lebih jelas dibandingkan dengan dokumen tertulis.

1. *Data Elektronis*

Dalam pengumpulan *data elektronis* dari situs (*website)* ataupun media internet lainnya, kita harus mempunyai keterampilan tersendiri serta harus berhati-hati dalam menyeleksi data yang akan kita ambil, terutama dalam menyeleksi kebenaran dan keakuratan data yang akan kita ambil sebagai bahan pembuatan laporan magang riset terapan pemerintahan ini dikarenakan perkembangan ikptek yang semakin maju sehingga setiap orang dapat mempublikasikan data yang belum tentu benar dan akurat sesui dengan keadaan yang sebenarnya. Kelebihan dari *data elektronik*  adalah lebih mudah dalam pengumpulan data yang kita butuhkan namun disamping kelebihan pasti ada kekurangan yaitu banyaknya sumber-sumber data yang tidak resmi sehingga belum tentu data yang dipublikasikan itu benar sesuai dengan kenyataannya. Sehingga peneliti diharapkan untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam mengambil data dari internet*.*

**Tabel** **3.1 Teknik Pengumpulan data**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Data yang akan di teliti** | **Sumber Data** | **Teknik Pengumpulan Data** | **Instrumen Data** | **Kegunaan Data** |
| 1 | Program / kegiatan pemberdayaan usaha mikro | Kepla dinas Koperindag | Wawancara | Pedoman wawancara | Untuk mengetahui apa saja program pemberdayaan terhadap usaha mikro |
| 2 | Bentuk program/  kegiatan pemberdayaan usaha mikro di kabupaten pringsewu | Kepala dinas Koperindag | wawancara/ dokumentasi | Pedoman wawancara/ Daftar Isian | Untuk mengetahui bagaimana bentuk program/kegiatan pemberdayaan usaha mikro di kabupaten pringsewu |
| 3 | Tujuan program/  kegiatan pemberdayaan usaha mikro di kabupaten pringsewu | Kepala dinas koperindag | Dokumentasi | Daftar Isian | Untuk mengetahui tujuan dari program/kegiatan pemberdayaan usaha mikro di kabupaten pringsewu |
| 4 | Sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro | Dokumen | Dokumentasi | Daftar isian | Untuk mengetahui apa saja sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro |
| 5 | Persentase usaha mikro terhadap keseluruhan industri/usaha kecil dan menengah/  Koperasi | Dokumen | Dokumentasi | Daftar Isian | Untuk mengetahui persenase usaha mikro terhadap keseluruhan industri/usaha kecil dan menengah/koperasi |
| 6 | Alokasi anggaran untuk melaksanakan program/  kegiatan pemberdayaan usaha mikro di kabupaten pringsewu | Dokumen | Dokumentasi | Daftar Isian | Untuk mengetahui alokasi anggaran untuk melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan usaha mikro di kabupaten pringsewu |
| 7 | Realisasi pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan usaha mikro | Dokumen | Dokumentasi | Daftar isian | Untuk mengetahui realisasi program/kegiatan pemberdayaan usaha mikro |
| 8 | Jumlah pelaku usaha mikro yang telah mengikuti program/kegiatan pemberdayaan | Dokumen | Dokumentasi | Daftar isian | Untuk Mengetahui jumlah pelaku usaha mikro di kabupaten pringsewu yang telah mengikuti program/kegiatan pemberdayaan |
| 9 | Jumlah pelaku usaha mikro yang belum mengikuti program/kegiatan pemberdayaan | Dokumen | Dokumentasi | Daftar isian | Untuk mengetahui jumlah pelaku usaha mikro di kabupaten pringsewu yang belum mengikuti program/kegiatan pemberdayaan |
| 10 | Respon pelaku usaha mikro terhadap program/kegiatan pemberdayaan yang sudah dilakukan | Pelaku usaha mikro yang telah mengikuti program/kegiatan pemberdayaan | Wawancara | Pedoman wawancara | Untuk mengetahui respon dari para pelaku usaha mikro terhadap program/kegiatan pemberdayaan yang sudah dilakukan |
| 11 | Manfaat yang dirasakan pelaku usaha mikro setelah mengikuti program/kegiatan pemberdayaan | Pelaku usaha mikro yang belum mengikuti program/kegiatan pemberdayaan | Wawancara | Pedoman wawancara | Untuk mengetahui manfaat yang dirasakan para pelaku usaha mikro setelah mengikuti program/kegiatan pemberdayaan |
| 12 | Fasilitas kredit dari pemerintah daerah terhadap pelaku usaha mikro | Pelaku usaha mikro | Wawancara | Pedoman wawancara | Untuk mengetahui tentang fasilitas kredit dari pemerintah daerah terhadap pelaku usaha mikro di kabupaten pringsewu |
| 13 | Subsidi kredit usaha mikro | Kepala dinas koperindag | Wawancara | Pedoman wawancara | Untuk mengetahui subsidi kredit yang diberikan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha mikro di kabupaten pringsewu |
| 14 | Persentase keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mikro pasca pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan | Pelaku usaha mikro | Wawancara | Pedoman wawancara | Untuk mengetahui seberapa besar keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mikro pasca pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan |
| 15 | Keaktifan/partisipasi pelaku usaha mikro dalam mengikuti program/kegiatan pemberdayaan termasuk kegiatan promosi produk usaha | Pelaku usaha mikro | Wawancara | Pedoman wawancara | Untuk mengetahui keaktifan/partisipasi pelaku usaha mikro dalam mengikuti program/kegiatan pemberdayaan termasuk kegiatan promosi produk usaha |
| 16 | Persentase omset penjualan produk usaha mikro | Pelaku usaha mikro | Wawancara | Pedoman wawancara | Untuk mengetahui persentase omset penjualan produk usaha mikro |

1. **Teknik Analisis Data**

Analisis bisa diartikan sebagai proses menyusun data supaya kita dapat menafsirkan data tersebut, menyusun data yang dimaksud adalah menggolongkan dengan pola, tema atau kategori. Agar data yang sudah diperoleh dapat di tafsirkan dengan baik, selanjutnya data yang sudah kita peroleh tersebutndisusun dan dikelompokkan ke dalam pola atau kategori tertentu.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2017).

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari beberapa sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data yang tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik analisis data yang digunakan belum ada pola yang jelas. Oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam melakukan analisis.

Menurut pernyataan Nasution dalam Sugiyono (2017 : 244) bahwa:

“melakukan analisis adalah pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis, sehngga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannyaa. Bahan yang sama bisa diklasifikasikan lain oleh peneliti yang berbeda”.

Susan Stainback, mengungkapkan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian yang kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dn konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. Spradley (1980) menyatakan bahwa analisis dalam penelitian jenis apapun, adalah merupakan cara berfikir. Hal itu berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungannya dengan keseluruhan. Analisis adalah untuk mencari pola.

Menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2017 : 246) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display* dan *conclusion drawing/verification.* Pembahasan dari aktivitas dalam anisis data tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Data reduction* (Reduksi Data)

Reduksi Data merupakanproses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi dalam merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan pola. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

Silalahi (2012:340) menyatakan bahwa :

“Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, memfokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data mentah atau kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan di tarik dan diverifikasi”.

1. *Data Display* (Penyajian Data)

Sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data pengamatan, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan.

1. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnyamasih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ditemukan walaupun ada kemungkinan untuk tidak dapat menjawab permasalahan tersebut. Bisa terjadi demikian karena sebelumnya sudah disampaikan bahwa permasalahan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah melakukan penelitian di lapangan langsung.

1. **Jadwal Magang**

Kegitan magang akan dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 201 sampai dengan selesai sesuai dengan jadwal sebagai berikut :

**Tabel 3.2. Jadwal Penelitian dan Penyusunan Skripsi Wasana Praja Tahun Akademik 2017/2018**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **KEGIATAN** | **OKT**  **2017** | | | | **NOV 2017** | | | | **DES**  **2017** | | | | **JAN 2017** | | | | **FEB 2018** | | | | **MAR**  **2018** | | | | **APR**  **2018** | | | | **MEI**  **2018** | | | | **JUNI**  **2018** | | | | **JULI**  **2018** | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bimbingan UP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Seminar UP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pembekalan Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pelaksanaan Penelitian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Bimbingan Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pengumpulan Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Ujian Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Perbaikan dan Pengumpulan Skripsi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Keterangan : = Pelaksanaan Kegiatan

Sumber : Kalender Akademik IPDN Tahun 2017/2018

**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan atas apa yang sudah di bahas di BAB sebelumnya. Kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu sudah sesuai dengan program yang direncanakan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya sudah cukup baik namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaannya tersebut. Pada saat pemerintah mengadakan pelatihan ataupun penyuluhan, tidak semua pelaku usaha mikro dapat mengikutinya. Ini dikarenakan pelaksanaan yang di acak atau hanya sebagian tidak menyeluruh. Jadi pelaksanaan pemberdayaannya tidak merata untuk semua pelaku usaha mikro. Dengan demikian para pelaku usaha mikro masih minim akan pengetahuan karena kurangnya informasi informasi pengetahuan bagi para pelaku usaha mikro terhadap usaha yang ditekuni. Hal ini yang dapat menghambat untuk mencapai tujuan dari pemberdayaan itu sendiri. Karena suatu program pemberdayaan dari pemerintah yang dilakukan untuk masyarakat sudah pasti mempunyai tujuan tertentu.

Ada pula tujuan dari pemberdayaan adalah sebagai berikut :

1. Supaya para pelaku usaha mikro dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal produksi.
2. Supaya dengan program penyuluhan yang dilakukan oleh tim penyuluh dengan teknik *“dor to dor”* dapat memberikan pemahan lebih atas apa yang tim penyuluh sampaikan dengan demikian para pelaku usaha mikro lebih berwawasan dan berpengetahuan terutama di bidang perizinan dan pemasaran;
3. Supaya para pelaku usaha mikro terbantu dan terfasilitasi dalam hal mencari informasi ke kementrian tentang bantuan bantuan yang bersangkutan dengan usaha yang dilakukan;
4. Supaya para pelaku usaha mikro terbantu dan terfasilitasi dalam hal promosi dan pemasaran sehingga para pelaku usaha mikro dapat memasarkan hasil produksinya secara meluas.
5. Dalam melaksanakan pemberdayaan kepada para pelaku usaha mikro di Kabupaten Pringsewu, pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu sebelumnya telah membuat program program supaya tau bagaimana cara yang harus dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu itu sendiri dalam memberdayakan masyarakat yang dalam hal ini adalah para pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Pringsewu. Program-program tersebut adalah bagian daripada bina usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu. Program-program yang merupakan bagian dari Bina Usaha tersebut adalah sebagai berikut :
   1. Pelatihan kewirausahaan terhadap para pelaku usaha mikro yang dilaksanakan di setiap tahunnya. Pelatihan tersebut dilaksanakan secaara “*random”* atau secara acak.
   2. Melakukan penyuluhan terhadap para pelaku usaha mikro dengan teknik penyuluhan “*dor to dor”*  yang artinya para penyuluh yang langsung terjun ke masyarakat atau mendatangi satu per sartu para pelaku usaha mikro dan memberikan penyuluhan secara langsung sehingga dapat lebih mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro. Penyuluhan tersebut terfokus pada penyluhan tentang perizinan, pemasaran dan lain sebagainya.
   3. Membantu dan memfasilitasi para pelaku usaha mikro dalam mencari informasi tentang bantuan ke kementerian yang bersangutan dengan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha mikro.
   4. Membantu dan memfasilitasi para pelaku usaha mikro dalam hal promosi dan pemasaran dengan membawa hasil produk para pelaku usaha mikro ke ajang pameran seperti: hari koperasi nasional, hari koperasi provinsi, lampung fair, smesko dan even-even tertentu yang berkaitan dengan pemasaran produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha mikro.

Dengan terlaksananya program program pemberdayaan tersebut, masih belum tentu menjamin akan kesejahteraan para pelaku usaha mikro tersebut. Ini disebabkan karena masih belum meratanya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu terhadap para pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Pringsewu. Dengan demikian masih ada pelaku usaha mikro di kabupaten Pringsewu yang belum merasakan atau mendapatkan perhatian berupa pemberdayaan dari Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu sendiri.

Kondisi Usaha Mikro di Kabupaten Pringsewu paska dilakukannya program-program pemberdayaan oleh Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu sudah dikatakan baik, para pelaku usaha mikro setelah mandapatkan pemberdayaan dari pemerintah menjadi bertambah pengetahuan tentang kewirausahaan, dapat mengurus izin usaha sehingga usaha yang mereka jalani mempunyai dasar hukum yang legal, dan bagi yang mempunyai masalah permodalan dapat diringankan berkat adanya pemberdayaan kepada para pelaku usaha mikro tersebut. Namun yang sangat disayangkan adalah dalam pelaksanannya masih kurang merata sehingga masih banyak pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah sehingga usaha yang di tekuni tidak sebanding dengan usaha yang telah mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu.

1. **Saran**

Bedasarkan dari kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis mengajukan beberapa masukan berupa saran sebagai bahan pertimbangan Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu agar lebih optimal dalam melaksanakan usaha pemberdayaan pelaku usaha mikro. Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Agar dipertahankan dan ditingkatkan kembali peran Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan program pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro karena sebagian pelaku usaha di kabupaten Pringsewu adalah pelaku usaha yang berskala Mikro.
2. Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu harus memperbaiki cara dalam melaksanakan bina usaha dalam hal ini adalah pelatihan dan penyuluhan kepada para pelaku usaha mikro supaya dalam pelaksanaannya dapat secara merata dan agar semua pelaku usaha mikro mendapat pengetahuan tentang kewirausahaan serta informasi informasi penting yang berkaitan dengan usaha yang ditekuni.
3. Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu harus menambah tim penyuluh dikarenakan menggunakan sistim “*dor to dor”* yang mengharuskan tim penyuluh tersebut turun secara langsung dalam memberikan penyuluhan. Agar dapat terlaksana secara merata, maka anggota tim penyuluh harus di perbanyak lahgi jumlahnya.

**BAB IV**

**ANALISIS FOKUS MAGANG**

**4.1 Gambaran Umum Lokasi Magang**

Dalam pelaksanaan Magang Riset Terapan Pemerintahan yang dilakukan penulis untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan akhir, penulis menentukan lokasi magang tersebut yaitu di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung tepatnya di Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu. Selain utnuk melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam penulisan Laporan Akhir, alasan penulis menentukan tempat magang tersebut dikarenakan penulis juga ingin memperdalam pengetahuan tentang pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pelaku usaha mikro yang ada di Kabupaten Pringsewu.

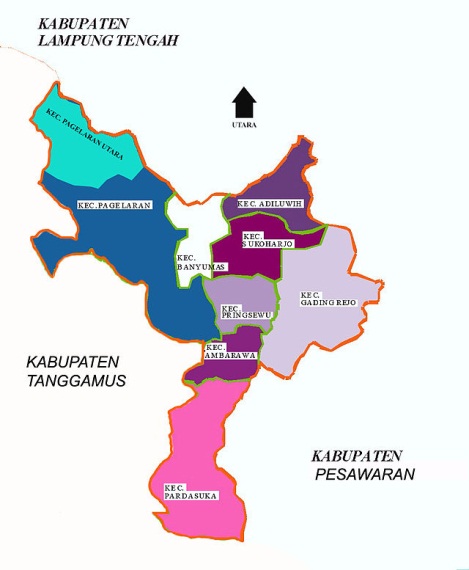
**4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu**

**4.1.1.1 Keadaan Geografis**

Dilihat secara geografisnya, Kabupaten Pringsewu terletak pada posisi 104o42’ – 105o8’ Bujur Timur dan antara 5o8’ – 6o8’ Lintang Selatan.

Batas-batas Wilayah administratif Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut :

* Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah.
* Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.
* Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus.
* Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran.

**Peta Kabupaten Pringsewu**

Kabupaten Pringsewu mempunyai luas wilayah daratan 625 km2, yang hampir seluruhnya berupa wilayah daratan. Kabupaten Pringsewu saat ini terbagi menjadi 9 kecamatan, yang terdiri dari 126 pekon dan 5 kelurahan. Sebelumnya kabupaten Pringsewu ini hanya memiliki 8 kecamatan. Secara administratif berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pringsewu terdiri dari 8 wilayah kecamatan. Namun pada akhir tahun 2013, jumlah kecamatan di Kabupaten Pringsewu menjadi 9 wilayah kecamatan. Hal ini dikarenakan adanya otonami daerah yaitu pemekaran Kecamatan Pagelaran yang terbagi atas Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara. Daftar nama Kecamatan, Kelurahan dan Pekon di Kabupaten Pringsewu dapat kita ketahui dengan melihat Tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1**

**Nama Ibukota Kecamatan dan Banyaknya Pekon (Desa) di Kabupaten Pringsewu Tahun 2015**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Kelurahan | Pekon |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Pardasuka | Pardasuka | - | 13 |
| 2 | Ambarawa | Ambarawa | - | 8 |
| 3 | Pagelaran | Gumuk Mas | - | 22 |
| 4 | Pagelaran Utara | Fajar Mulya | - | 10 |
| 5 | Pringsewu | Pringsewu | 5 | 10 |
| 6 | Gadingrejo | Gadingrejo | - | 23 |
| 7 | Sukoharjo | Sukoharjo | - | 16 |
| 8 | Banyumas | Banyumas | - | 11 |
| 9 | Adiluwih | Adiluwih | - | 13 |
| Jumlah/Total | | | 5 | 126 |

*Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu*

Dari tabel tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa di Kabupaten Pringsewu didominasi dengan wilayah pekon/desa yang berjumlah 126 pekon sedangkan kelurahan yang hanya berjumlah 5 saja dan hanya terdapat di Kecamatan Pringsewu.

**4.1.1.2 Keadaan Demografi**

A. Struktur Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Data struktur penduduk Kabupaten Pringsewu berdasarkan jenis kelamin yang terdiri dari 9 kecamatan pada tahun 2015, menunjukkan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki mencapai 198.304 jiwa dan perempuan mencapai 188.587 jiwa. Untuk lebih jelasnya, struktur penduduk Kabupaten Pringsewu menurut jenis kelamin Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini :

**Tabel 4.2**

**Banyaknya Penduduk Kabupaten Pringsewu Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2015**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Pardasuka | 17 763 | 16 344 | 34 107 |
| 2 | Ambarawa | 17 364 | 16 672 | 34 036 |
| 3 | Pagelaran | 23 935 | 22 395 | 46 330 |
| 4 | Pagelaran Utara | 7 954 | 7 416 | 15 370 |
| 5 | Pringsewu | 41 168 | 40 237 | 81 405 |
| 6 | Gadingrejo | 37 446 | 35 414 | 72 860 |
| 7 | Sukoharjo | 24 387 | 23 384 | 47 771 |
| 8 | Banyumas | 10 498 | 9 804 | 20 302 |
| 9 | Adiluwih | 17 789 | 16 921 | 34 710 |
| Jumlah | | 198 304 | 188 587 | 386 891 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu*

Dari tabel tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa jika dilihat dari persebarannya jumlah penduduk di Kabupaten Pringsewu paling tinggi menempati wilayah Kecamatan Pringsewu yang dalam hal ini Kecamatan Pringsewu sebagai ibukota Kabupaten dengan jumlah penduduk mencapai 81.405 orang yang terdiri dari 41.168 penduduk laki-laki dan 40.237 penduduk perempuan.

B. Struktur Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Dari data jumlah penduduk tersebut diatas yang telah dibahas sebelumnya, jumlah penduduk di Kabupaten Pringsewu dapat dikelompokkan berdasarkan umurnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah ini :

**Tabel 4.3**

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Pringsewu Tahun 2017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 0 – 4 | 18 482 | 17 571 | 36 053 |
| 2 | 5 – 9 | 18 659 | 17 506 | 36 165 |
| 3 | 10 – 14 | 18 027 | 17 065 | 35 092 |
| 4 | 15 – 19 | 17 309 | 16 676 | 33 985 |
| 5 | 20 – 24 | 15 301 | 13 776 | 29 077 |
| 6 | 25 – 29 | 14 905 | 13 625 | 28 530 |
| 7 | 30 – 34 | 15 115 | 14 346 | 29 461 |
| 8 | 35 – 39 | 15 468 | 14 927 | 30 395 |
| 9 | 40 – 44 | 14 971 | 14 090 | 29 061 |
| 10 | 45 – 49 | 12 840 | 12 236 | 25 076 |
| 11 | 50 – 54 | 10 895 | 10 475 | 21 370 |
| 12 | 55 – 59 | 8 741 | 8 379 | 17 120 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 13 | 60 – 64 | 6 671 | 5 787 | 12 458 |
| 14 | 65 – 69 | 4 302 | 4 279 | 8 581 |
| 15 | 70 – 74 | 3 035 | 3 353 | 6 388 |
| 16 | 75+ | 3 583 | 4 496 | 8 079 |
| Jumlah | | 198 304 | 188 587 | 386 891 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu*

Dilihat dari tabel tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Pringsewu berdasarkan kelompok umur didominasi oleh balita dan anak-anak, sedangkan remaja usia produktif menempati urutan kedua.

1. **Visi dan Misi Kabupaten Pringsewu**
2. **Visi Kabupaten Pringsewu**

Pada hakekatnya visi Kabupaten Pringsewu Mengadopsi dari visi Bupati/ Wakil Bupati terpilih, yaitu komitmen bersama merepresentasikan semua komponen masyarakat. Visi tersebut juga menjadi milik bersama dan diyakini oleh aparatur pemerintahan Daerah serta masyarakat yang bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu. Dengan mempertimbangkan bagaimana kondisi, permasalahan, potensi, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Pringsewu serta selaras dengan motto pemerintah Kabupaten Pringsewu periode 2011-2016 yaitu **“Bersenyum Manis”** yang merupakan singkatan atau kependekan kata dari beberapa kata yaitu bersih, sehat, ekonomi, nyaman, unggul, mandiri, dan agamis. Maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Pringsewu tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut: **“Pringsewu Unggul, Dinamis dan Agamis Berbasis Ekonomi Kerakyatan”.**

Penjelasan makna dari Visi Kabupaten Pringsewu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unggul

Kata Unggul mempunyai konotasi melebihi yang lain (bisa saja lebih baik, lebih pandai,lebih cepat, lebih cakap, lebih kuat, lebih tangguh, lebih ulet, lebih tinggi, dll) baik dalam skala kawasan lokal maupun regional. Keunggulan yang dimaksud adalah mencakup domain perekonomian, ilmu pengetahun dan teknologi serta *civilization* (politik dan hukum). Saat ini Kabupaten Pringsewu memiliki keunggulan sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, kawasan agribisnis dan industri pengolahan.

1. Pusat Perdagangan dan Jasa

Pusat perdagangan yang dalam hal ini adalah mengandung arti bahwa Kabupaten Pringsewu berdasarkan bentuk aktivitasnya pada pengembangan ekonomi yang lebih menitik beratkan pada aspek perniagaan yang menjadi hal terpenting pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan tidak meninggalkan potensi ekonomi lokal lainnya. Faktor pendukungnya adalah :

1. Kabupaten Pringsewu merupakan jalur distribusi barang dan jasa untuk koridor barat Provinsi Lampung Sesuai dengan letak geografisnya. Hal ini yang membuat aktivitas perdagangan dan jasa di Kabupaten Pringsewu menjadi lebih cepat berkembang secara natural jika kita bandingkan dengan daerah kabupaten lain di sekitarnya.
2. Nilai tambah output (PDRB) sektor perdagangan dan jasa Kabupaten Pringsewu saat ini cenderung mengalami percepatan pertumbuhan dari tahun ke tahun, begitu juga dengan kontribusinya terhadap total PDRB Kabupaten Pringsewu yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.
3. Kawasan Agribisnis dan Industri Pengolahan

Pada sektor pertanian (secara umum : Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan) Pringsewu memiliki keunggulan dibidang pertanian tanaman bahan makanan, pertanian walaupun jika ditinjau dari laju pertumbuhan dan kontribusinya terhadap total PDRB Kabupaten Pringsewu dari tahun ke tahun berada pada urutan tertinggi jika dibandingkan dengan sektor lainnya akan tetapi secara parsial laju pertumbuhan dan kontribusinya sektor pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Pringsewu dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Pengembangan agribinis di Kabupaten Pringsewu lebih diarahkan pada upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian *(competitive advantage).* Mengingat Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu lumbung padi di Provinsi Lampung yang keberadaanya perlu mendapat perhatian akibat adanya perubahan tata guna lahan, khususnya lahan pertanian menjadi lahan terbangun secara sporadis, seiring dengan perkembangan tingkat perekonomian wilayah. Perkembangan industri kecil dan menengah diarahkan pada industri pengolahan hasil produk pertanian dan kerajianan. Hal ini untuk mendukung keberlanjutan aktivitas agribisnis dan mengembangkan perdagangan dan jasa.

1. Dinamis

Dinamis adalah sikap dan kondisi masyarakat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman, mudah menyesuaikan diri dengan keadaan, serta berkontribusi dalam proses pembangunan. Dinamis juga diartikan kondisi masyarakat yang jauh dari konflik dengan beragam variannya, seperti konflik sosial, agama, kelompok, kepentingan tertentu dan juga konflik antar masyarakat itu sendiri. Dinamis meminjam istilah politik adalah kondisi masyarakat yang selalu mengedepankan konsensus, kerjasama dan juga bersikap kooperatif dalam menyelesaikan beragam masalah yang timbul didalam masyarakat.

1. Agamis
2. Terwujudnya kerukunan antar dan intern umat beragama, dalam sub visi ini mencerminkan adanya keinginan untuk senantiasa menjaga agar dalam wilayah Kabupaten Pringsewu tercipta kerukunan sesama antar pemeluk agama yang sama dan sesama antar pemeluk agama yang berbeda, sehingga hubungan harmonis semua masyarakat dapat terwujud.
3. Terpenuhinya hak-hak dasar dalam menjalankan ajaran agama, merupakan keinginan agar masyarakat menghormati umat pemeluk agama / kepercayaan berbeda untuk menjalankan aktivitas / mengamalkan ajaran agama / kepercayaannya, sehingga tidak ada konflik antar / inter agama mengenai pendirian rumah ibadah, perayaan hari besar agama maupun aktivitas rutin agama lainnya.
4. Terwujudnya kehidupan beragama yang mampu menjadi katalisator pembangunan. Hal ini merupakan cita-cita untuk meningkatkan kepedulian sosial dalam masyarakat sehingga mau bergotong-royong memerangi kemiskinan, pengangguran serta berperan serta dalam pembangunan fasilitas umum.
5. Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan watak atau tatanan ekonomi dimana pemilikan aset ekonomi harus didistribusikan kepada masyarakat secara optimal, efisien, dan adil. Dalam ekonomi kerakyatan, peran pemerintah ditempatkan sebagai penyedia barang publik dan jasa publik. Intervensi pemerintah dalam ekonomi rakyat hanya diperlukan untuk menjamin mekanisme distribusi aset terjadi melalui mekanisme pasar. Ekonomi kerakyatan tidak bermaksud mempertentangkan ekonomi besar dengan ekonomi kecil, ekonomi kerakyatan bukan mempertentangkan antara *wong cilik* dengan *wong gedhe*, ekonomi kerakyatan bukan hanya sekedar bagaimana bagaimana usaha kecil, menengah, dan usaha mikro dilindungi tetapi bagaimana mengembangkan menjadi usaha skala lebih besar. Menjadi wilayah berbasis ekonomi kerakyatan mempunyai pengertian bahwa Kabupaten Pringsewu menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi dengan melibatkan masyarkat sebagai pemeran utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah pengembangan ekonomi yang didasarkan pada pengembangan semua sumberdaya dan potensi lokal, serta mampu mengoptimalkan semua keunggulan wilayah yang dimiliki secara efisien dan adil.

1. **Misi Kabupaten Pringsewu**

Misi adalah suatu mandat yang diemban oleh suatu organisasi. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka misi pembangunan daerah untuk tahun 2011-2016 adalah :

1. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar sesuai dengan tata ruang wilayah.
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.
4. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah *“Good Governance and Clean Government”.*
5. Membangun masyarakat religius, berbudaya, tentram dan harmonis.

**4.1.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan**

Startegi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriteriannya mencakup:

1. Hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih;
2. Hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu stratejik;
3. Pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun dan dikembangkan dalam suatu pemetaan starategi daerah.

**4.1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu**

1. **Visi dan Misi**

Visi adalah suatu pandangan yang terdapat pada organisasi atau lembaga yang mempunyai pandangan jauh tentang tujuan-tujuan dan apa yang harus dilakukan untuk menggapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Guna mewujudkan visi jangka panjang dan visi jangka menengah Kabupaten Pringsewu, maka Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustriaan Kabupaten Pringsewu menetapkan visinya sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu ini memiliki visi : “Terwujudnya Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian yang berkualitas, tangguh, berdaya saing dan berwawasan lingkungan”.

Visi tersebut jika dilihan secara filosofis dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya, yaitu:

1. Terwujudnya; Terkandung di dalamnya yaitu upaya dan peran Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustriaan Kabupaten Pringsewu dalam mewujudkan Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustriaan Kabupaten Pringsewu yang berkualitas, tangguh,berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
2. Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustriaan Kabupaten Pringsewu merupakan suatu bidang ekonomi pada sektor koperasi, ukm, perdagangan dan perindustrian;
3. Berkualitas merupakan kondisi sektor koperasi, ukm, perdagangan dan perindustrian yang memiliki kualitas yang baik;
4. Tangguh merupakan kondisi yang dapat bertahan dalam keadaan yang sulit,penuh tantanagn dan persaingan;
5. Berdaya saing merupakan kondisi dimana Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustriaan Kabupaten Pringsewu memiliki keunggulan – keunggulan dan kemampuan untuk bersaing dengan daerah lain;
6. Berwawasan lingkungan merupakan kondisi yang selalu memperhatikan terhadap lingkungan sekitar akibat aktifitas yang ditimbulkan;

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustriaan Kabupaten Pringsewu harus memiliki misi yang jelas demi mewujudkan atas visi yang telah ditetapkan sebelumnya, misi tersebut yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) aparatur pembina dan pelaku koperasi, UKM, perdagangan dan industri melalui bimbingan teknis dan pelatihan- pelatihan;
2. Meningkatkan pelayanan publik melalui pengembangan fasilitas sarana dan prasarana pendukung, penataan, pembinaan dan pemberdayaan SDM aparatur negara agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan profesional dengan semangat ekonomi kerakyatan;
3. Mengoptimalkan promosi baik dalam maupun luar negeri dalam rangka mengembangkan pasar, perlindungan konsumen dan pengamanan dalam peredaran barang dan jasa dari Kabupaten Pringsewu;
4. Meningkatkan dalam hal pengawasan dan pembinaan mutu produksi hasil Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal dan berwawasan lingkungan.
5. **Struktur Organisasi Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian**
6. Kepala Dinas
7. Sekretaris
8. Bidang Koperasi dan UKM membawahkan:

* Seksi Peningkatan dan Pemberdayaan UKM
* Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
* Seksi Pengembangan Koperasi dan UKM

1. Bidang Perdagangan, membawahkan:

* Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
* Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Pasar
* Seksi Sarana Perdagangan Dalam Negeri.

1. Bidang Perindustrian, membawahkan:

* Seksi Sarana dan Usaha Industri
* Seksi Bimbingan Produk dan Hasil Industri
* Seksi Monitoring dan Pengembangan Industri.

1. Unit Pelaksana Teknis.
2. **Sumber Daya Manusia**

Pegawai Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu di dominasi oleh pegawai yang terdiri dari berbagai macam golongan. Untuk mengetahui jumlah dan kepegawaian, kita dapat melihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**

**Kepegawaian berdasarkan golongan dan jabatan tahun 2018**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Nama | Golongan | Jabatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ir. Junaidi Hasyim, M.M. |  | Plt. Kepala Dinas |
| 2 | Drs. Nang Abidin Hasan | IV/b | Sekretaris |
| 3 | Cicilia Levana, S.H. | III/c | Ka. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 4 | Reka Pahlevi, ST.MT | III/c | Ka. Sub Bagian Perencanaan dn Keuangan |
| 5 | Choirul Ulum, S.H. | III/b | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 6 | Erwin Mafri, S.H. | III/b | Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| 7 | Dini Krisnawindari, S.E. | III/b | Staf Sub Bagian Keuangan |
| 8 | Yekti Utami, S.E. | III/b | Staf Sub Bagian Keuangan |
| 9 | Yuliansyah, A.Md | II/d | Staf Sub Bagian Keuangan |
| 10 | Masjidah, S.E., M.M. | IV/b | Ka. Bidang Koperasi dan UKM |
| 11 |  |  | Ka. Seksi Peningkatan dan Pemberdayaan UKM |
| 12 | Ade Syafutra, S.IP., M.M. | III/c | Ka. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi |
| 13 | Silvia Herni, S.H., M.H. | III/c | Ka. Seksi Pengembangan Koperasi dan UMKM |
| 14 | Renfil, S.H | IV/a | Pelaksana Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian |
| 15 |  |  | Ka. Bidang Perindustrian |
| 16 | Gumilya Eka Pertiwi, S.Sos. | III/c | Ka. Seksi Sarana dan Usaha Industri |
| 17 | Andayani BA | III/d | Ka. Seksi Bimbingan Produksi dan Hasil Industri |
| 18 | Sulistyo Ningsih, S.E., M.M. | III/c | Ka. Seksi Monitoring dan Pengembangan Industri |
| 19 | Siska Handayani, S.Kom. | III/b | Ka. UPT Pengembangan Produk dan Pemasaran Hasil Industri |
| 20 | Romy Hermansyah | III/a | Staf Perindustrian |
| 21 | Yuhandi Afriansyah | III/a | Staf Perindustrian |
| 22 | M. Nurdin, S.TP | IV/a | Kepala Bidang Perdagangan |
| 23 | Rinnelda Pentawati, S.E. | III/c | Ka. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga |
| 24 | Neti Oktarina, S.E. | III/b | Ka. Seksi Pembinaan dan Pengelolaan Pasar |
| 25 | M. Andri Dwiharto, S.AP., M.M. | III/c | Ka. Seksi Sarana Perdagangan Dalam Negeri |
| 26 | Mardiyanto, S.H. | III/c | Pelaksana Dinas |
| 27 | Andi Nur Cahyo, A.Md. | II/d | Staf Seleksi Perlindungan & Tertib Niaga |
| 28 | Sugeng Pramono, S.E. | III/d | Ka. UPT Pasar Pringsewu |
| 29 | Dwi Haryadi, S.E. | III/d | Ka. UPT Pasar Pagelaran |
| 30 | Drs. Trino | III/c | Ka. UPT Pasar Pardasuka |
| 31 | Sudarman, S.E. | III/c | Ka. UPT Pasar Gading Rejo |
| 32 | Andreo Marza, ST.MT | III/c | Ka. UPT Pasar Sukoharjo |
| 33 | Saprizal, S.Pd. | III/a | Staf UPT Pasar Gading Rejo |
| 34 | M. Rizani | II/a | Staf UPT Pasar Pringsewu |
| 35 | M. Yasin | II/a | Staf UPT Pasar Pringsewu |
| 36 | M. Kahfi | II/a | Staf UPT Pasar Pringsewu |
| 37 | Nari | II/a | Staf UPT Pasar Sukoharjo |

1. **Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu**

Dinas Koperasi, UKM, perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkanasas otonomi dan tugas pembantuan, serta tugas lain sesuai dengan kenijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu mempunyai fungsi sebagai berikut :

* 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum seuai dengan lingkup tugasnya;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  5. Pengelola ketatausahaan.

**4.2 Analisis Fokus Magang**

**4.2.1 Pemberdayaan terhadap Pelaku usaha mikro oleh Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu**

Sesuai dengan teori Totok dan Poerwoko (2013), dalam memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompokmlemah dalam masyarakat, salah satu nya pemerintah perlu meningkatkan kesempatan dalam berusaha kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha mikro. Dalam meningkatkan kesempatan dalam berusaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha mikro, Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu membuat beberapa program, yaitu:

* 1. Pelatihan kewirausahaan terhadap para pelaku usaha mikro yang dilaksanakan di setiap tahunnya. Pelatihan tersebut dilaksanakan secaara “*random”* atau secara acak, dalam arti pelaksanaan pelatihan tersebut dilaksanakan tidak rutin dan belum tentu seorang pelaku usaha mikro setiap tahunnya mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Pelatihan ini terfokus pada kegiayan para pelaku usaha mikro yang sifatnya produksi.
  2. Melakukan penyuluhan terhadap para pelaku usaha mikro dengan teknik penyuluhan “*dor to dor”*  yang artinya para penyuluh yang langsung terjun ke masyarakat atau mendatangi satu per sartu para pelaku usaha mikro dan memberikan penyuluhan secara langsung sehingga dapat lebih mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro. Penyuluhan tersebut terfokus pada penyluhan tentang perizinan, pemasaran dan lain sebagainya.
  3. Membantu dan memfasilitasi para pelaku usaha mikro dalam mencari informasi tentang bantuan ke kementerian yang bersangutan dengan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha mikro.
  4. Membantu dan memfasilitasi para pelaku usaha mikro dalam hal promosi dan pemasaran dengan membawa hasil produk para pelaku usaha mikro ke ajang pameran seperti: hari koperasi nasional, hari koperasi provinsi, lampung fair, smesko dan even-even tertentu yang berkaitan dengan pemasaran produk yang dihasilkan oleh para pelaku usaha mikro.

Apabila dibandingkan dengan kondisi di lapangan pada saat penulis melakukan magang, memang program itu benar dilaksanakan oleh Pemerintah khususnya Dinas Koperasi, UKM, perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu namun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dari apa yang ingin dicapai. Pada saat pemerintah mengadakan pelatihan ataupun penyuluhan, tidak semua pelaku usaha mikro dapat mengikutinya. Ini dikarenakan pelaksanaan yang di acak atau hanya sebagian tidak menyeluruh. Seperti yang di katakan oleh bapak Supriono pengrajin rotan di Kecamatan Pagelaran pada saat wawancara:

“ada sih mas kalau untuk penyuluhan dan pelatihan, tapi ya itu dia mas masih kurang merata, belum semua kebagian. Jadi setiap ada program tersebut ya belum tentu kami ikut mas padahal kami butuh sekali pelatihan pelatihan tersebut mas”.

**Table 4.5**

**jumlah pelaku usaha mikro di Kabupaten Pringsewu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | KECAMATAN | JUMLAH UNIT USAHA | | | | | PRESENTASE  USAHA MIIKRO |
| MIKRO | KECIL | | | MENENGAH |
| 1 | ADILUWIH | 188 | 47 | | | 1 | 6,74 |
| 2 | AMBARAWA | 160 | 71 | | | 0 | 5,73 |
| 3 | BANYUMAS | 304 | 114 | | | 0 | 10,89 |
| 4 | GADINGREJO | 587 | 258 | | | 9 | 21,04 |
| 5 | PAGELARAN | 255 | 163 | | | 1 | 9,14 |
| 6 | PAGELARAN UTARA | 23 | 2 | | | 0 | 0,82 |
| 7 | PARDASUKA | 101 | 35 | | | 0 | 3,62 |
| 8 | PRINGSEWU | 993 | 310 | | | 29 | 35,60 |
| 9 | SUKOHARJO | 178 | 57 | | | 2 | 6,38 |
|  | **JUMLAH** | **2789** | | **1057** | **42** | |  |

1. **Bina Usaha**

Seperti yang dikatakan oleh Chabib Soleh pada tahun 2014, walaupun pemerintah melakukan program pemberdayaan dalam bentuk apapun namun tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan para pelaku usaha mikro, maka pelaku usaha mikro tersebut tidak akan memberikan dukungan dalam bentuk partisipasi secara efektif. Karena yang ada di benak mereka adalah bagaimana melakukan sebuah usaha dengan memperoleh peningkatan kesejahteraan dalam kehidupannya. Dengan demikian pemerintah harus melakukan pembinaan pembinan terhada usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha mikro.

Yang dilakukan Pemerintah khususnya Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu dalam melakukan bina usaha antara lain :

1. Mengadakan pelatihan kewirausahaan setiap tahun yang dilakukan secara acak. Dalam artian untuk waktu dan tempatnya belum pasti dan tidak ditentukan sebelumnya. Pelatihan kewirausahaan ini diutamakan bersifat produksi. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM, ibu Masjidah, S.E., M.M. pada hari kamis 18 Januari 2018:

“kami dari Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu selalu mengadakan pelatihan dan workshop tentang kewirausahaan di setiap tahunnya, meskipun masih dilakukan secara acak”

1. Melakukan penyuluhan dengan cara penyuluh yang langsung turun ke lapangan. Penyuluhan yang dilakukan adalah penyuluhan tentang perizinan suatu usaha dan mencarikan informasi tentang bantuan bantuan masyarakat yang berasal dari kementerian yang berasal dari dana APBN serta pemasaran dari hasil usaha tersebut dengan cara membawa produk ke ajang pameran dan mempromosikan semua hasil usaha mikro yang ada di Kabupaten Pringsewu. Seperti yang dikatakan oleh bapak Septa salah satu pegawai penyuluh lapangan dalam wawancara yang dilakukan pada hari Rabu 10 Januari 2018:

“kalau kami melakukan penyuluhannya langsung turun ke lapangan dek karena kan data dta dari pelaku usaha mikro diminta cepat oleh dinas sedangkan kalau kita menunggu mereka waktunya gak efektif jadi kami yang langsung turun ke lapangan”.

1. **Tujuan Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro**

Setiap kegiatan yang dilakukan atau program yang dibuat oleh suatu instansi sudah pasti mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai supaya untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi, tujuan dari pemberdayaan pelak usaha mikro di Kabupaten Pringsewu yaitu: 1) supaya dengan pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi,UKM Perdagangan dan Perindustrian, para pelaku usaha mikro dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal produksi. 2) supaya dengan program penyuluhan yang dilakukan oleh tim penyuluh dengan teknik *“dor to dor”* dapat memberikan pemahan lebih atas apa yang tim penyuluh sampaikan dengan demikian para pelaku usaha mikro lebih berwawasan dan berpengetahuan terutama di bidang perizinan dan pemasaran; 3) supaya para pelaku usaha mikro terbantu dan terfasilitasi dalam hal mencari informasi ke kementrian tentang bantuan bantuan yang bersangkutan dengan usaha yang dilakukan; 4) supaya para pelaku usaha mikro terbantu dan terfasilitasi dalam hal promosi dan pemasaran sehingga para pelaku usaha mikro dapat memasarkan hasil produksinya secara meluas.

1. **Masalah yang Dihadapi Pelaku Usaha Mikro**

Masalah pelaku Usaha Mikro di daerah manapun sebenarnya hampir sama sekitar mengenai tentang produksi, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan sebagainya. Berdasarkan hasil Magang Riset Terapan Pemerintahan dan wawancara dengan para pelaku usaha mikro didapat kesimpulan permasalahan sebagai berikut :

1. Masalah Bahan Baku

Usaha mikro yang produksinya melalui pesanan seperti usaha kain perca dan konveksi lain, produksinya tergantung dari pesanan bahan baku itu sendiri. Tentunya untuk produk yang melalui pesanan, para pengusaha kain perca dan konveksi laiinya harus mempertimbangkan waktu pesanan, kreasi atau ide tentang varian produk dan sebagainya yang akan menarik bagi para pembeli sehingga produksi tetap berjalan.

1. Masalah Permodalan

Masalah yang dianggap klasik bagi Usaha Mikro pada umumnya adalah masalah permodalan. Memang dalam kenyataan modal usaha bagi usaha Mikro adalah relatif kecil, namun untuk bisa memajukan dan mengembangkan usahanya diperlukan modal yang cukup untuk membeli alat-alat produksi agar mampu menghasilkan output yang maksimal dan lebih berkualitas.

1. Masalah Produksi

Pada pelaku usaha mikro yang sudah unggul yang sering kali menjadi permasalahan adalah dalam hal produksi. Dari salah satu pelaku usaha mikro unggulan yaitu bapak Rohim dengan usaha pengrajin kain perca, saat saya wawancara mengatakan :

“sering kali masalah dalam produksi mas. Karena usaha saya ini termasuk unggulan dan sudah punya banyak konsumen, nah ketika konsumen memesan barang dengan jumlah yang banyak disitu kadang saya merasa kesulitan dalam memenuhi jumlah barang yang di pesan. Ya karena tenaga kerjanya jug aterbatas”. Namanya juga usaha mikro semua serba terbatas”.

Sangat disayangkan ketika usaha yang dirintis sudah berkembang bahkan menjadi usaha yang unggulan didaerahnya membuat kpara konsumennya kecewa hanya dikarenakan tidak mampu memenuhi jumlah produk yang dipesan oleh para konsumen.

1. Masalah pemasaran

Ada beberapa produk usaha mikro yang penjualannya harus keluar daerah seperti industri tas tapis, hasil pertanian seperti pengusaha ternak ikan air tawar, industri rumah tangga dan beberapa souvenir yang perlu adanya ikut campur tangan Pemerintah Daerah untuk mempromosikan produknya.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Bambang salah satu pengusaha budidaya ikan air tawar di Kecamatan Pagelaran, pada hari Rabu 17 Januari 2017 menyatakan bahwa mereka bingung untuk memasarkan hasil budidaya maupun hasi dari olahannya :

“kami masih bingung mas untuk pemasaran ikan dari hasil usaha kami, baik hasil budidaya maupun hasil oahannya. Kami dapat memasarkan secara luas hanya jika ada acara acara pameran tertentu, kalau gak ada acara ya hanya menunggu pembeli yang datang ke rumah atau datang langsung ke kolam penakaran”.

1. Masalah Lokasi Penjualan

Berikut ini yang ibu dikatakan Suaini sebagai pengrajin tas bermotif tapis yaitu kain khas Lampung pada saat diwawancara:

“lokasi penjualan ya dirumah ini saja, kalau membuka toko pasti biayanya juga lebih besar ya mas, belum untuk nyewa tempat,belum uga untuk karyawan toko, jadi dirumah sendiri lebih hemat dan selain itu aksesnya juga mudah langsung sama tempat produksinya. Butuh apa ya tiggal ambil kan dekat”.

Dari penyampaian di atas hal tersebut menjadi permasalahan ketika lokasi usaha yang mereka tempati berada jauh dari tempat berjualan yang strategis. Pada akhirnya orang kurang begitu tahu jika di daerah tersebut terdapat usaha mikro dan akan berdampak pada penjualan atau pemasaran produk dari Usaha Mikro tersebut.

1. **Upaya dan Hambatan yang dialami Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu**

Upaya Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat agar makin adil dan merata terus ditingkatkan melalui pertumbuhan ekonomi. Upaya pemerataan yang nyata dalam bentuk perbaikkan pendapatan dan peningkatan daya beli masyarakat. Keberhasilan pembangunan yang dirasakan sebagai perbaikan taraf hidup rakyat oleh segenap golongan masyarakat akan semakin meningkatkan kesadaran tentang makna serta manfaat pembangunan sehingga motivasi rakyat semakin tergugah untuk berperan aktif di dalamnya terutama dalam dunia usaha mikro.

Dalam upaya memperluas peran aktif masyarakat pada kegiatan ekonomi serta menopang peningkatan pemerataan pertumbuhan ekonomi, maka perlu terus dikembangkan usaha-usaha mikro untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Kebijakan untuk memajukan golongan ekonomi lemah melalui perluasan terhadap sumber-sumber ekonomi dan faktor-faktor produksi. Semua upaya yang dilakukan sudah sesuai dengan rencana kerja Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu pada bidang Koperasi dan UKM.

**Tabel 4.6**

**Upaya yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program Kegiatan** | **Volume** | **Lokasi** | **Keterangan** |
| 1 | Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 1 kali kegiatan, 30 peserta | Gedung NU, Kabupaten Pringsewu | Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri kepada para wirausahawan dan pelaku industry |
| 2 | Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan | 1 kali kegiatan, selama 7 hari, 20 peserta | Hotel Sarinongko, Kabupaten Pringsewu | Memberikan pelatihan kewirausahaan terhadap 20 wirausaha yang ada di Kabupaten Pringsewu |
| 3 | Penyelenggaraan Industri Rumah Tangga, Kecil dan Menengah | 1 kali kegiatan, 30 peserta | Kabupaten Pringsewu | Memberikan pelatihan bagi industry kecil menengah dan rumah tangga |
| 4 | Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah | 1 kali kegiatan, selama 7 hari | Nasional | Memperkenalkan dan Mempromosikan Produk-produk Unggulan. |
| 5 | Pendataan Calon Penerima KUR di Kabupaten Pringsewu | 1 kali | 9 Kecamatan | Memperoleh data calon penerima KUR yang valid |
| 6 | Promosi dan Pameran Industri Dagang Kecil dan Menengah | 6 kali | Nasional | Mempromosikan produk-produk unggulam Kabupaten Pringsewu secara nasional |
| 7 | Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri | 1 kali, 10 orang | Jawa Tengah | Pelatihan industry batik |

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu bukan tanpa hambatan, karena upaya ini menyangkut berbagai permasalahan yang kompleks. Adapun hambatan yang melingkupi pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kabupaten Pringsewu berdasarkan hasil penelitian yaitu keterbatasan kemempuan yang dimiliki oleh Dinas Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu dalam menyelenggarakan tugasnya ditambah dengan tingkat pendidikan, keterampilan dan kemampuan untuk berusaha dari masyarakat yang masih rendah juga terbatasnya informasi bisnis dan teknologi mengenai industri kecil dan keterbatasan modal dari para pelaku usaha mikro tersebut.Di samping itu saat ini Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu belum bisa memberikan fasilitas subsidi kredit usaha mikro dikarenakan Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu belum mempunyai anggaran khusus untuk membantu permodalan para pelaku usaha mikro yang ada di kabupaten pringsewu, tetapi Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu dapat membantu memfasilitasi para pelaku usaha mikro dalam mencari informasi bantuan bantuan pemerintah, salah satu contohnya adalah bantuan langsung yang diberikan kepada para pelaku usaha mikro dari kementerian yang anggarannya berasal dari APBN. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM, ibu Masjidah, S.E., M.M. pada saat wawancara pada hari kamis 18 Januari 2018 :

“kalau untuk fasilitas subsidi kredit kami belum ada, tetapi kami selalu membantu mencari dan menyebarkan informasi tentang bantuan bantuan dari pemerintah seperti bantuan yang diberikan oleh kementerian kepada para pelaku usaha mikro yang anggarannya berasal dari APBN”.

1. **Langkah-langkah Antisipatif Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu**
   1. **Menciptakan Iklim Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang Kondusif**

Menciptakan iklim usaha yang kondusif merupakan bagian yang paling penting dalam memasarkan produk. Salah satu media dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif adalah dengan melalui Pameran Promosi Produk Koperasi dan UKM di Jakarta. **Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu pada tahun 2017 telah mengikutsertakan beberapa produk-produk hasil dari para pelaku usaha mikro berupa makanan, minuman dan produk kerajinan lainnya yang merupakan produk-produk unggulan dari Kabupaten Pringsewu dalam kegiatan tersebut. Pada tahun 2017 jumlah untuk jenis produk yang diikutsertakan sebanyak 10 jenis produk makanan dan kerajinan dari target semula pada tahun 2012 sebanyak 7 jenis produk atau naik sekitar 42,85 % dengan harapan pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih meningkat lagi.**

Ada beberapa kendala dalam keikutsertaan kegiatan promosi tersebut diantaranya adalah mempersiapkan materi pameran yang akan dipromosikan terutama dalam hal mobilisasi materi pameran. Hal ini juga disebabkan oleh masuknya informasi jadwal pameran yang diterima oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu tidak memberikan waktu yang cukup panjang dalam mempersiapkan kegiatan tersebut.

ibu Masjidah, S.E., M.M. selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM mengatakan pada saat wawancara pada hari kamis 18 Januari 2018 :

“Untuk kedepan kami telah menyiapkan tempat penyimpanan sementara materi-materi pameran tersebut di kantor Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu, sehingga mobilitas materi-materi pameran untuk dikutsertakan dalam kegiatan tersebut dapat ditingkatkan dan pencapaian target dari sasaran strategis Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dapat tercapai dengan baik”.

* 1. **Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi**

Dalam upaya Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi pada tahun 2017, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu telah mengadakan pelatihan diantaranya adalah untuk meningkatkan kemampuan pengurus/pengelola Koperasi dalam mengelola organisasi yang mereka miliki karena koperasi adalah salah satu aspek pendukung para pelaku usaha mikro dalam memasarkan produk-produk hasil dari para pelaku usaha mikro.

* 1. **Mengembangkan Sentra-Sentra Industri Potensial**

Pengembangan sentra-sentra industri potensial yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu juga telah memberikan pencapaian yang menggembirakan selain sesuai dengan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja, juga membuka peluang baru bagi terbentuknya sentra industri di Kabupaten Pringsewu terutamanya adalah industri kerajinan kain perca. Industri ini juga diharapkan akan menjadi kebanggaan dan menjadi ciri khas dari Kabupaten Pringsewu.

Dalam kegiatan pengembangan sentra-sentra industri di Kabupaten Pringsewu, selain olahan kain perca Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu juga melaksanakan pembinaan bagi para pengrajin bambu di Kabupaten Pringsewu dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi kerajinan bambu sehingga dapat bersaing dengan produk kerjinan sejenis dari daerah lain.

Selain pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, juga dilakukan pengembangan dan kreativitas dari bentuk anyaman sampai dengan pola anyaman yang merupakan hasil kreasi dari instruktur yang sebagian didatangkan dari luar daerah Pringsewu. Untuk jumlah pengrajin olahan kain perca yang mengikuti pelatihan sebanyak 30 orang, semua pengrajin berasal dari sentra industri olahan kain perca yang berada di desa Sukamulya Kecamatan Banyu Mas.

* 1. **Meningkatkan Promosi Hasil Industri**

Salah satu kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis adalah meningkatkan promosi produk-produk dari usaha mikro, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu juga mengikutsertakan produk-produk usaha mikro unggulan dari Kabupaten Pringsewu dalam 9 (Sembilan) event kegiatan Promosi baik di dalam kabupaten maupun di luar kabupaten Pringsewu yang bertaraf nasional dan internasional dan total telah mempromosikan 20 produk unggulan dalam seluruh eventnya. Sembilan event diantaranya adalah : Keikutsertaan pada INACRAFT, Pameran HUT Pringsewu, Pameran MTQ Tingkat Provinsi, Pameran Lomba Pekon Tingkat Provinsi Lampung, Pameran Lomba BKB Tingkat Provinsi Lampung, Pameran Lomba Kesrak/PKP dan KB Kesehatan Tingkat Provinsi Lampung, Keikutsertaan Dalam Pameran Otonomi Expo, Pameran dan Bazar dan Pameran Lomba Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS).

Dengan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan promosi ini diharapkan dapat dikenal luasnya produk-produk unggulan dari daerah Pringsewu secara lokal, nasional maupun internasional sehingga dapat meningkatkan transaksi penjualan dan pendapatan serta kesejahteraan para pelaku usaha mikro, baik industri kerajinan maupun industri makanan.

* 1. **Memberikan Perlindungan dan Pengamanan Kepada Konsumen dan Pedagang**

Salah satu cara untuk memberikan kenyamanan dan perlindungan kepada konsumen dan pedagang adalah dengan melaksanakan kegiatan terra ulang terhadap alat ukur yang digunakan dalam aktivitas perdagangan. Dengan tertibnya alat ukur yang digunakan dalam bertransaksi, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap konsumen dalam berbelanja.

Kegiatan ini sangat diperlukan di Kabupaten Pringsewu, namun mengingat ketidak tersediaan petugas terra ulang yang telah tersertifikasi di Kabupaten Pringsewu maka pada tahun 2018 Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu telah menganggarkan kegiatan sertifikasi penera untuk dikirim ke Metrologi di Bandung untuk mengikuti pendidikan agar SDM penera tersedia di Kabupaten Pringsewu.

* 1. **Meningkatkan Perdagangan dan Pembinaan**

Pada tahun 2017 ini Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu melakukan kegiatan pasar murah dan monitoring harga sembako dan pupuk bersubsidi dalam rangka meningkatkan perdagangan dan pembinaan. Pasar murah yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pringsewu ini adalah dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pokoknya sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menengah ke bawah.